Kampung Apung Berdaya sebagai Inisiatif Sosial untuk Mengentaskan Kemiskinan Perkotaan

Firman Firman*[1], Asmi Rezkiah Tanjung[2]
[1,2] Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
*firman@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas inisiatif sosial yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan di Kampung Apung, sebuah kawasan permukiman padat di Jakarta Utara. Kemiskinan struktural menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan ini. Melalui program pengabdian masyarakat, dilakukan serangkaian kegiatan seperti pelatihan keterampilan, literasi sosial, dan penguatan UMKM berbasis komunitas. Artikel ini menjelaskan proses, metode, serta capaian kegiatan yang dilakukan selama pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas warga baik secara ekonomi maupun sosial. Kesimpulannya, intervensi sosial berbasis partisipatif menjadi strategi efektif untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan struktural.

Kata Kunci: kampung apung, kemiskinan struktural, pemberdayaan masyarakat, pengabdian sosial

ABSTRACT

This article discusses social initiatives carried out to address urban poverty in Kampung Apung, a densely populated settlement in West Jakarta. Structural poverty is the main challenge faced by the community in this area. Through community service programs, a series of activities such as skills training, social literacy, and community-based MSME strengthening were carried out. This article describes the process, methods, and outcomes of the activities. The results show increased community capacity both economically and socially. In conclusion, participatory-based social interventions are an effective strategy to lift communities out of structural poverty.

***Keywords**: kampung apung, structural poverty, community empowerment, social engagement*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di kawasan urban bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan layak (Watif, dkk, 2024). Meskipun kota identik dengan peluang, tidak semua warga kota dapat menikmati akses yang setara terhadap layanan dan infrastruktur dasar (Ramadiani, P., & Mardiansjah, F. H., 2017).. Ketimpangan ini memperlihatkan wajah kemiskinan yang lebih kompleks dan tersembunyi di balik modernitas kota besar. Dalam konteks Jakarta, fenomena kantong-kantong kemiskinan menjadi nyata, salah satunya dapat dilihat di wilayah Kampung Apung, Jakarta Utara. Permukiman ini merupakan contoh konkret dari kawasan rentan yang mengalami marginalisasi sosial, spasial, dan ekonomi. Letaknya yang berada di area tergenang dan berstatus tidak resmi menyebabkan wilayah ini kerap luput dari perhatian pembangunan dan program sosial secara menyeluruh.

Permasalahan kemiskinan di Kampung Apung tidak hanya soal rendahnya pendapatan warga, tetapi juga mencerminkan kemiskinan struktural yang melibatkan

kerentanan lingkungan, terbatasnya peluang kerja formal, serta stigma sosial yang melekat pada identitas komunitasnya. Hal ini menyebabkan warga Kampung Apung terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar-generasi yang sulit diputuskan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya intervensi kebijakan yang berkelanjutan. Ketidakjelasan legalitas lahan membuat kawasan ini seringkali tidak masuk dalam peta prioritas pembangunan infrastruktur maupun layanan publik. Sementara itu, bantuan-bantuan yang datang bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dalam kerangka pembangunan berbasis masyarakat

Di sisi lain, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH)**,** Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**,** dan Kartu Jakarta Pintar/Kartu Jakarta Sehat sebenarnya telah menjangkau sebagian warga Kampung Apung. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bantuan ini belum dimaksimalkan sebagai alat transformasi sosial-ekonomi. Banyak warga hanya menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek tanpa ada pendampingan untuk perencanaan jangka panjang. Optimalisasi bantuan sosial harus diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui strategi yang terukur, seperti pendampingan usaha mikro, pelatihan keterampilan produktif, dan literasi keuangan keluarga. Bantuan tunai dan non-tunai dapat menjadi modal awal yang dikelola secara kolektif, misalnya untuk membentuk koperasi warga atau kelompok usaha berbasis komunitas.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pengabdian masyarakat melalui program *"Kampung Apung Berdaya"* mencoba menawarkan pendekatan baru yang lebih integratif. Program ini tidak hanya memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan, tetapi juga mendorong warga untuk memetakan sendiri kebutuhan dan potensi lokal mereka. Strategi ini memungkinkan warga menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Sosialisasi hak-hak sosial dan pelatihan literasi hukum juga menjadi bagian penting dari intervensi. Warga yang memahami haknya dapat lebih aktif dalam menuntut akses layanan publik, terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan mengorganisir komunitasnya untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hal ini akan memperkuat posisi tawar mereka di hadapan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan sektor swasta dapat memperluas dampak program. Pendekatan multi-aktor ini memungkinkan integrasi antara bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha ke dalam satu kerangka pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menciptakan jalur menuju transformasi struktural**.** Melalui kombinasi strategi tersebut, harapannya warga Kampung Apung dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara bertahap, dengan mengembangkan ketahanan ekonomi, solidaritas sosial, dan kapasitas warga dalam membangun masa depan yang lebih baik. "Kampung Apung Berdaya" bukan hanya program pengabdian, tetapi juga simbol harapan bahwa komunitas miskin pun dapat menjadi aktor utama perubahan, jika diberi ruang dan dukungan yang tepat.

METODE

Tempat dan Waktu Kegiatan dilakukan di Kampung Apung selama bulan Juni-Juli 2025. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil pemetaan sosial yang menunjukkan kebutuhan akan intervensi edukatif dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif warga sebagai mitra sejajar dalam proses pemetaan masalah, perencanaan program, hingga implementasi kegiatan. Analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara

terbuka, observasi lingkungan, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan warga dan tokoh lokal.

Tempat dan Waktu.
Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kampung Apung, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kampung ini merupakan permukiman padat dengan kondisi lingkungan kumuh dan mayoritas dihuni oleh warga berpenghasilan rendah. Kegiatan berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Februari hingga Mei 2025, dengan intensitas kegiatan utama setiap akhir pekan dan koordinasi daring selama hari kerja.

Khalayak Sasaran.
Khalayak sasaran kegiatan terdiri atas warga usia produktif (18–55 tahun), khususnya ibu rumah tangga, pemuda pengangguran, dan lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, sasaran kegiatan juga mencakup tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan kader posyandu yang memiliki pengaruh dalam mobilisasi komunitas.

Indikator Keberhasilan
Salah satu capaian penting dari program *Kampung Apung Berdaya* adalah meningkatnya pemahaman warga terhadap hak-hak sosial dan akses layanan publik. Sebelum kegiatan dimulai, banyak warga yang belum mengetahui secara jelas hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak atas jaminan kesehatan, bantuan sosial, perumahan layak, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi kelompok, warga mulai memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh layanan dasar dari negara, seperti BPJS Kesehatan, bantuan pangan, pendidikan gratis, hingga akses terhadap informasi publik. Dalam beberapa sesi, warga juga diberikan panduan praktis mengenai cara mendaftar atau mengakses layanan-layanan tersebut, termasuk mekanisme pengaduan jika terjadi ketidakadilan.
Perubahan ini ditunjukkan melalui peningkatan keaktifan warga dalam kegiatan komunitas, keikutsertaan mereka dalam musyawarah lingkungan, serta kemampuan mereka dalam mengakses layanan yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau. Beberapa warga yang sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan akhirnya berhasil terdaftar sebagai peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), dan beberapa lainnya mulai mengurus dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial. Peningkatan literasi sosial ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program, karena ketika warga memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak-haknya, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Kesadaran kolektif yang tumbuh juga menciptakan ruang solidaritas dan advokasi bersama, yang memperkuat posisi tawar komunitas dalam menjalin hubungan dengan pemangku kebijakan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Sosialisasi dan Pemetaan Partisipatif

Tahap awal dari program *Kampung Apung Berdaya* diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pemetaan kebutuhan berbasis komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi terbuka dan musyawarah warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat lokal,

termasuk tokoh RT/RW, ibu rumah tangga, pemuda, serta kader lingkungan. Metode yang digunakan bersifat partisipatif, yakni menggali langsung perspektif, pengalaman, dan aspirasi warga terkait kondisi sosial-ekonomi mereka. Dalam forum-forum ini, warga menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyampaikan berbagai isu yang selama ini mereka alami secara langsung. Beberapa isu utama yang mengemuka antara lain keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak, tidak stabilnya penghasilan keluarga akibat pekerjaan informal, serta buruknya sanitasi lingkungan yang berdampak pada kesehatan. Selain itu, muncul pula keluhan terkait kurangnya informasi dan pendampingan dalam mengakses bantuan sosial yang tersedia dari pemerintah.

Pemetaan kebutuhan ini dilakukan dengan alat bantu sederhana seperti peta sosial, denah lingkungan, dan formulir identifikasi potensi lokal. Warga secara aktif menandai titik-titik rawan, sumber daya yang tersedia (seperti lahan kosong, kelompok pengajian, warung komunitas), serta peluang-peluang usaha yang memungkinkan dikembangkan. Proses ini bukan hanya menghasilkan data sosial yang akurat, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap permasalahan yang dihadapi komunitas. Informasi yang diperoleh melalui pemetaan partisipatif ini kemudian dijadikan dasar dalam merancang program-program intervensi yang relevan, terukur, dan kontekstual. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dirancang tidak bersifat top-down, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata warga dan potensi lokal yang bisa diberdayakan. Dengan demikian, tahap sosialisasi dan pemetaan ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program secara keseluruhan.

B. Pelatihan Keterampilan dan Literasi Digital

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan kebutuhan warga, kegiatan pelatihan keterampilan dan literasi digital dirancang untuk menjawab tantangan penghasilan warga yang tidak stabil serta keterbatasan pengetahuan teknologi. Pelatihan ini dilaksanakan secara terstruktur dalam tiga kelas utama: keterampilan kuliner, pengolahan limbah menjadi kerajinan tangan, dan penggunaan media digital untuk pemasaran produk. Kegiatan pelatihan berlangsung selama tiga minggu dengan pendekatan praktik langsung (*learning by doing*) yang melibatkan instruktur dari mitra UMKM lokal dan fasilitator dari perguruan tinggi. Peserta diajarkan teknik-teknik dasar produksi, standar kebersihan produk, pengemasan menarik, hingga cara menghitung harga jual. Dalam kelas kuliner, warga memproduksi keripik singkong dan olahan pisang, sedangkan kelas daur ulang menghasilkan sabun dari minyak jelantah dan aksesoris dari limbah plastic (Mayasari dkk, 2025; Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., & Iqbal, A. 2021; Firman, F., & Rahmawati, R., 2023).

Selain keterampilan produksi, peserta juga diberikan pelatihan dasar literasi digital, yang meliputi pembuatan akun media sosial (Instagram, WhatsApp Business), teknik foto produk, penulisan caption promosi, serta penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana. Literasi digital ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memperkenalkan warga pada peluang ekonomi digital, terutama di tengah keterbatasan mobilitas fisik mereka. Antusiasme warga dalam mengikuti pelatihan cukup tinggi, dengan tingkat kehadiran lebih dari 85% di tiap sesi. Banyak peserta yang sebelumnya gagap teknologi, mulai percaya diri menggunakan smartphone mereka tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga sebagai alat produktif untuk promosi usaha. Dalam evaluasi akhir, lebih dari separuh peserta menyatakan mampu mempraktikkan ulang keterampilan yang diperoleh secara mandiri di rumah.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dalam aspek teknis, tetapi juga membangkitkan semangat wirausaha dan solidaritas antarwarga. Beberapa kelompok peserta bahkan mulai merancang kolaborasi usaha secara kolektif, seperti berbagi bahan baku dan berbagi platform promosi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang terintegrasi antara keterampilan dan literasi digital dapat menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di tingkat komunitas.

C. Penguatan Komunitas "Warga Apung Berdaya"

Sebagai hasil dari rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, warga Kampung Apung kemudian membentuk forum komunitas. Melalui dialog terbuka dan audiensi, forum mengangkat isu-isu penting seperti akses terhadap bantuan sosial, legalitas tempat tinggal, dan kebutuhan sarana sanitasi dasar. Upaya ini memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas warga dalam berinteraksi dengan sistem birokrasi dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif. Keberadaan forum warga juga menciptakan mekanisme kontrol sosial dan evaluasi antarwarga. Beberapa kelompok usaha yang terbentuk dalam program didampingi langsung oleh anggota forum dalam hal pengelolaan usaha dan distribusi keuntungan. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas internal dalam komunitas.

Secara tidak langsung, terbentuknya forum ini menjadi indikator penting dari bertumbuhnya modal sosial dan kesadaran kewargaan di tengah masyarakat marginal. Warga mulai menyadari bahwa perubahan tidak harus menunggu instruksi dari luar, tetapi bisa dimulai dari pengorganisasian internal yang solid dan berbasis pada semangat gotong royong. Forum *Warga Apung Berdaya* dengan demikian bukan hanya wadah administratif, tetapi juga simbol transformasi sosial yang lahir dari bawah.

SIMPULAN

Inisiatif sosial *"Kampung Apung Berdaya"* menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas individu dan kolektif warga untuk menghadapi tantangan kemiskinan struktural di wilayah perkotaan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan integratif, program ini mampu mendorong transformasi pada berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari peningkatan keterampilan ekonomi, literasi sosial, hingga penguatan solidaritas komunitas. Kegiatan sosialisasi dan pemetaan partisipatif berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai permasalahan yang dihadapi secara bersama dan potensi yang dimiliki oleh warga. Selanjutnya, pelatihan keterampilan dan literasi digital tidak hanya memperluas wawasan warga dalam mengelola usaha, tetapi juga membuka akses terhadap peluang ekonomi berbasis teknologi yang relevan dengan tantangan zaman.

Penyuluhan mengenai hak-hak sosial dan akses terhadap layanan publik turut mendorong perubahan sikap warga, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini tercermin dari peningkatan partisipasi dalam forum musyawarah lokal dan inisiatif warga dalam mengakses bantuan pemerintah. Pembentukan forum *Warga Apung Berdaya* menjadi titik balik penting dalam mengorganisir kekuatan kolektif dan membangun jejaring strategis dengan pihak eksternal. Secara keseluruhan, intervensi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan jika didukung dengan pendekatan yang tepat, pelibatan warga secara penuh, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, agar manfaat program ini dapat bertahan dalam jangka panjang, diperlukan dukungan kebijakan yang berpihak, keterlibatan aktif pemerintah daerah, serta kemitraan lintas sektor yang memungkinkan replikasi model ke kawasan-kawasan rentan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Watif, M., JT, A. R., Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *3*(4), 536-547.

Ramadiani, P., & MARDIANSJAH, F. H. (2017). Penilaian Kemiskinan Partisipatif pada Kawasan Transisi Perdesaan ke Perkotaan di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, *1*(1), 28-41.

Syarif, E., & Maddatuang, M. (2023). Dinamika Kemiskinan Nelayan.

Mayasari, R., Heryana, N., & Resmana, S. A. (2025). Peran Pelatihan Literasi Digital dalam Meningkatkan Keterampilan Pemuda Karang Taruna. *Surya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *7*(1), 1-10.

Praseptiawan, M., Nugroho, E. D., & Iqbal, A. (2021). Pelatihan Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Perangkat Desa Taman Sari. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 521-528.

Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *9*(1).

LBH Jakarta. (2024). Panduan Hukum Dasar untuk Warga Miskin Kota. Jakarta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Bandung: Alfabeta.